



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YAYUK AFIYANAH
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 94984

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **4.530.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/75 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 615.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 615.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 269 m2/269 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **163.300.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 800.000
2. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000



4. MOBIL, MITSUBISHI SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.360.151.965
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	6.055.351.965
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.055.351.965

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.